

**GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP
INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL
INDONESIA TAHUN 2019**

Oleh: Iga Dhea Hanif

Igadhea@gmail.com

Pembimbing : Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Daftar Pustaka : 12 Jurnal, 18 Buku, 67 Situs web

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL.HR. Soebrantas KM. 12,5
Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study will discuss the lawsuit filed by the European Union to the World Trade Organization (WTO) related to the policy of banning nickel ore exports issued by Indonesia in 2019. The European Union sued Indonesia to the WTO regarding trade barriers because nickel is one of the main raw materials in the manufacture of stainless steel which has long occupied a strategic position in the European Union economy. The reason for the European Union to sue Indonesia even though it does not import nickel ore from Indonesia is the focus of this research.

This research is an explanation qualitative research that emphasizes the depth of the data obtained by the researcher. The theory used to analyze the thesis case study is the theory of trade liberalization. The theory of trade liberalization put forward by Adam Smith explains that international trade must be based on the principle of a free market, where the flow of goods from one country to another must be free from all forms of obstacles.

This study shows that Indonesia's policy of banning nickel ore exports has made it difficult for the European Union to obtain nickel raw materials for its stainless steel industry. As the world's largest nickel producer, Indonesia's policies have made global nickel supplies scarce and nickel prices higher. This policy also made it difficult for the European Union's stainless steel industry to compete, especially with the Indonesian stainless steel industry, so the European Union chose to sue Indonesia to the WTO.

Keyword: *Export Ban, Nickel, Lawsuit, European Union, Indonesia, WTO*

PENDAHULUAN

Nikel merupakan mineral yang sedang hangat diperbincangkan. Sifatnya yang tahan karat, magnetik dan mampu menghantarkan panas dengan baik¹ membuat permintaan akan nikel semakin meningkat. Indonesia masuk kedalam 10 besar negara produsen nikel terbesar di dunia dengan total cadangan sebesar 5,74% dari total cadangan nikel diseluruh dunia.² Indonesia mampu memproduksi nikel sebanyak 800.000 MT.

Selama bertahun-tahun Indonesia masih mengekspor nikelnya dalam bentuk *raw material*, sementara cadangan nikel di Indonesia semakin menipis dan hanya mampu menyokong kebutuhan dalam negeri selama 7 hingga 8 tahun lagi. Pada 28 Agustus 2019 pemerintah Indonesia mengeluarkan Permen ESDM No.11 tahun 2019 yang berisi tentang larangan ekspor bijih nikel termasuk yang memiliki kadar dibawah 1,7%. Bijih nikel berkadar rendah itu akan diolah menggunakan industri dalam negeri agar dapat memiliki nilai tambah saat diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi pemasukan Negara.

Indonesia terbukti menjadi negara produsen nikel terbesar di dunia, kebijakan yang dikeluarkan Indonesia ini sontak membuat pasar kalang kabut dan harga nikel melambung tinggi. Saat kabar mengenai kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia beredar, harga nikel langsung berada pada US\$ 16.675/ton³, naik sebesar 1,2% dari harga sebelumnya, hal ini membuktikan

bahwa nikel Indonesia sangat mempengaruhi harga jual nikel di pasaran.

Sebagai negara eksportir nikel terbesar saat ini, tentu saja larangan ekspor mineral mentah khususnya nikel yang mulai berlaku pada Januari 2020 itu menyita perhatian dunia dan mendapatkan respon dari berbagai negara salah satunya adalah Uni Eropa.

Industri baja telah lama menempati posisi yang strategis dalam perekonomian, mendorong inovasi pertumbuhan, dan lapangan kerja di kawasan Uni Eropa, karena sektor industri baja memiliki keterkaitan dengan banyak industri hilir seperti otomotif, elektronik dan lain-lain. Produksi baja Uni Eropa merupakan yang kedua terbesar setelah China dengan total output lebih dari 177 Juta ton per tahun, 11% dari total output global,⁴ maka tidak heran bahwa Uni Eropa sangat bergantung pada pasokan bahan baku untuk industrinya terutama nikel.

Industri baja Uni Eropa tengah mengalami hambatan kritis. Kelebihan kapasitas dipasar global yang disebabkan oleh krisis karena pandemi covid menyebabkan produksi baja di Uni Eropa telah menurun sebesar 40%. Hal ini berdampak buruk pada pekerja, terdapat setidaknya 45% pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sementara dan pengurangan jam kerja, dan banyak lainnya. Ditambah pasar Uni Eropa tengah digempur oleh baja importir dari China.⁵ Menyikapi keputusan pemerintah Indonesia itu, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Dengan mengirimkan surat permintaan konsultasi kepada delegasi Indonesia melalui *Dispute Settlement Bodies* (DSB). Gugatan yang dilayangkan Uni Eropa terdaftar dengan nomor registrasi DS592.

¹Shaleh Lalu M, Wahyu Atjo, K3 *Pertambangan Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*. (Yogyakarta: Deepublish,2019). 13.

²Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, *Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM,2017),38

³Tirta Citradi, "RI Setop Ekspor Nikel Lebih Cepat, Harga Bakal Melonjak!," CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191029103919-17-110876/ri-setop-ekspor-nikel-lebih-cepat-harga-bakal-melonjak> (diakses 16 Desember,2020)

⁴European Commissions, "The EU steel industry," https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel_en (diakses 16 Desember,2020)

⁵Industri All Global Union, "European action day for steel" <http://www.industrialunion.org/european-action-day-for-steel> (diakses 16 Desember,2020)

Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dilihat Uni Eropa sebagai hambatan perdagangan..⁶

Gugatan tersebut terkait dengan protes terhadap kebijakan Indonesia mengenai berbagai langkah menyangkut bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi stainless steel, serta skema pembebasan bea masuk lintas sektor yang tergantung pada penggunaan domestik barang impor. Terdapat beberapa poin yang di klaim Uni Eropa telah dilanggar oleh pemerintah Indonesia, yaitu :

1. Pasal XI.1 GATT tentang larangan pembatasan ekspor dan impor,
2. Pasal 3.1 (b) Agreement on Subsidy and Countervailing Measures tentang subsidi yang dilarang
3. Pasal X.1 GATT tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan⁷

Uni Eropa membawa permasalahan ini ke WTO karena baik Uni Eropa maupun Indonesia keduanya merupakan anggota dari WTO. Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dilihat Uni Eropa sebagai hambatan perdagangan. Oleh karena itu terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia, Uni Eropa merasa sangat dirugikan.

KERANGKA TEORI

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumenter dan *Library Research*. Penelitian ini menggunakan perspektif Neoliberalisme dan teori Liberalisasi Perdagangan. Pada dasarnya, teori perdagangan liberal dipelopori oleh dua tokoh yaitu Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nation*" dan David Ricardo. Menurut Adam Smith Kunci dari kekayaan serta kekuatan

suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi dengan perdagangan internasional sebagai sarana untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi tersebut. Kunci lain dari teori ini yaitu Perdagangan Internasional harus berdasarkan pada prinsip pasar bebas dimana arus barang dari satu negara ke negara lain harus terbebas dari hambatan-hambatan politik, sehingga pergerakan suatu barang antar negara berlangsung secara alamiah dan bebas berdasarkan hukum pasar. . Teori ini menegaskan bahwa upaya pembatasan terhadap arus barang antar negara akan menyebabkan terjadinya penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat menggerogoti seluruh kekuatan negara. Bentuk hambatan tersebut seperti:

1. Proteksi, yaitu kebijakan pemerintah dalam bentuk membatasi arus impor dan ekspor barang dan jasa yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik. Beberapa bentuk proteksi adalah larangan ekspor dan impor, subsidi, kuota dan lain-lain.
2. Dumping, yaitu penjualan barang diluar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga didalam negeri.
3. Tarif atau Bea cukai, yaitu penetapan pajak pada produk impor maupun ekspor, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan konsep Kepentingan Nasional. Pada dasarnya konsep kepentingan nasional menjelaskan bahwa kepentingan nasional harus dipenuhi agar suatu negara dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya.⁸

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN UNI EROPA DIBIDANG MINERBA

Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018, Indonesia berada pada posisi ke-6 di dunia untuk negara yang memiliki ketersediaan

⁶Philip Blenkinsop, "EU takes Indonesia to WTO over nickel ore export curbs," *Commodities News* <https://www.reuters.com/article/us-eu-indonesia-trade-idUSKBN1XW1D8> (diakses 16 Desember,2020)

⁷*Ibid*.

⁸Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana,2015), 204.

sumber daya alam yang tersebar dan beragam jenis. Terdapat beberapa jenis sumber daya alam berupa mineral logam yang menjadi komoditas andalan bagi Indonesia antara lain yaitu emas, besi, tembaga, nikel, bauksit dan perak.⁹ Menurut data dari laporan Badan Geologi pada tahun 2018 bahwa untuk sumber daya Tembaga mencapai 12.468,35 juta ton, Besi sebesar 12.079,45 juta ton, Emas 11.402,33 juta ton yang melimpah di beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua, perak sebesar 6.433,01 juta ton, Bauksit 3.301,33 juta ton yang tersebar di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, Timah 3.878,29 juta ton yang tersebar di wilayah Bangka Belitung dan Riau, sedangkan Nikel sebesar 9.311,06 juta ton yang banyak ditemukan di Sulawesi Maluku dan Papua Barat.¹⁰ Dengan keberadaan SDA yang melimpah seperti ini, maka tidak heran jika banyak negara yang melakukan hubungan kerjasama dan juga melakukan kegiatan impor mineral dari Indonesia salah satunya yaitu Uni Eropa.

Uni Eropa sangat bergantung pada pasokan mineral dalam bentuk mentah terutama untuk logam. Mengingat cadangan beberapa mineral penting terutama logam sangat langka di kawasan tersebut, maka negara anggota UE sangat bergantung pada impor mineral mentah dari negara lain agar tetap bisa mendorong perekonomian mereka.¹¹ Mineral dalam bentuk bahan baku sangat menentukan pertumbuhan dan daya

saing ekonomi di UE. Untuk mineral logam saja, lebih dari 40% pekerjaan dan nilai tambah dari sektor manufaktur UE bergantung pada bahan mentah.¹² Eropa tidak hanya mengimpor bijih dan konsentrat dalam jumlah besar, tetapi juga logam olahan, senyawa dan paduan logam olahan, serta produk jadi dan setengah jadi dalam jumlah yang besar. Konsumsi logam UE terkait erat dengan aktivitas produksi dan pertambangan global. Selain hubungan pendek melalui impor bijih dan konsentratnya langsung dari negara produsen, sejumlah besar impor logam UE juga berasal dari negara-negara pengolah yang menjadi sumber setidaknya bagi sebagian bijih secara global yang juga mengimpor bijih logam dari negara produsen. China dan Rusia berkontribusi secara signifikan terhadap rantai pasokan ini serta berbagai negara industri dan negara berkembang lainnya.¹³

Industri pengolahan dan pemanfaatan barang mentah atau raw materials merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang perekonomian Uni Eropa.¹⁴ Sekitar 30 juta orang bekerja pada industri pengolahan dan pemanfaatan bahan mentah seperti industri otomotif, konstruksi bangunan, kimia, mesin dan lain-lain. kemajuan industri dan pengembangan teknologi di negara-negara

⁹Agung Pribadi, "Bertemu Media, Dirjen Minerba Jelaskan Potensi Sumber Daya dan Cadangan Minerba," *Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia* <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bertemu-media-dirjen-minerba-jelaskan-potensi-sumber-daya-dan-cadangan-minerba> (diakses pada 27 Maret 2021)

¹⁰Ibid.

¹¹European Commission, "Critical raw materials," https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en (diakses pada 28 Maret 2021)

¹²Mattia Pellegrini, "Fostering the mining potential of the European Union," *European Geologist Journal* 42 <https://eurogeologists.eu/european-geologist-journal-42-fostering-mining-potential-european-union/> (diakses tanggal 28 Maret 2021)

¹³Doris Schuler, "EU's ore and metal import flows and engagement towards responsible sourcing in industry supply chains," *ECDPM News* <https://ecdpm.org/great-insights/mining-for-development/eus-ore-metal-import-flows-engagement-towards-responsible-sourcing-industry-supply-chains/> (diakses tanggal 28 Maret 2021)

¹⁴European Commission, "Critical Raw Materials," https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en (diakses pada 28 Maret 2021)

Uni Eropa sangat bergantung kepada ketersediaan mineral dalam bentuk bahan mentah atau raw material yang kebanyakan berada di wilayah Asia dan Afrika serta beberapa dari wilayah Eropa seperti Ukraina dan Rusia.¹⁵ Di Uni Eropa sendiri terdapat Raw Materials Initiative (RMI) yang bertujuan untuk mengamankan posisi Uni Eropa didalam rantai supply mineral dalam bentuk bahan mentah. Mengamankan pasokan bahan mentah yang berkelanjutan adalah prioritas utama bagi UE.¹⁶

Nilai Ekspor Minerba Indonesia ke UE Tahun 2016-2019¹⁷

NO.	TAHUN	HARGA (US\$)
1.	2016	\$367,083,462
2.	2017	\$466,809,854
3.	2018	\$457,867,858
4.	2019	\$259,168,826

Tabel diatas menyajikan total ekspor mineral Indonesia ke Uni Eropa dari tahun 2016-2019 baik dalam bentuk mentah atau yang sudah diolah menjadi produk setengah jadi maupun jadi. Total impor mineral Indonesia ke Uni Eropa bisa dikatakan lumayan besar, namun tentu saja Indonesia bukan menjadi negara satu-satunya yang menjadi negara pengimpor mineral utama bagi UE.

¹⁵Ibid.

¹⁶European Commission, "Policy And Strategy For Raw Materials" https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_en (diakses pada 28 Maret 2021)

¹⁷UN Comtrade, <https://comtrade.un.org/> (diakses pada 23 April 2021)

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA

Nikel mempunyai banyak fungsi dan kegunaan yang dapat menunjang dan mendukung kehidupan manusia saat ini. Strukturnya yang keras, mudah dibentuk serta ulet dan juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik membuat nikel banyak dijadikan sebagai bahan utama dalam logam paduan. Biasanya perpaduan antara nikel dengan besi dan kromium akan menghasilkan baja yang tahan karat dan juga sangat keras.¹⁸ Letak geografis Indonesia yang berada pada zona dengan iklim tropis dan subtropis, membuat Indonesia kaya akan keberadaan endapan nikel laterit modern. Sehingga, potensi cadangan nikel cukup besar di Indonesia.

Indonesia memegang peranan yang penting dengan berada pada posisi pertama sebagai negara dengan produksi nikel terbanyak yaitu sebesar 800.000 Metrik Ton, dan Filipina sebagai negara yang menempati posisi kedua dengan jumlah total produksi yang masih jauh jika dibandingkan dengan produksi nikel Indonesia. Maka tidak heran bahwa banyak negara yang bergantung pada pasokan produksi nikel dari Indonesia. Indonesia memegang sebesar 37,2% dari total ekspor nikel di dunia atau kurang lebih mencapai USD 1,7 Miliar.¹⁹ Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, produk nikel mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, Industri ini berhasil tumbuh sebesar 61% selama 5 tahun terakhir. Produk ini kebanyakan digunakan sebagai komponen dalam pembuatan baja

¹⁸Nickel Institute, "The nickel advantage," <https://nickelinstitute.org/about-nickel/stainless-steel/the-nickel-advantage/> (diakses 23 April 2021)

¹⁹Administrator, "Posisi Indonesia Sulit Tersaingi," *Indonesia.Go.Id* <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/posisi-indonesia-sulit-tersaingi> (diakses pada 5 April 2021)

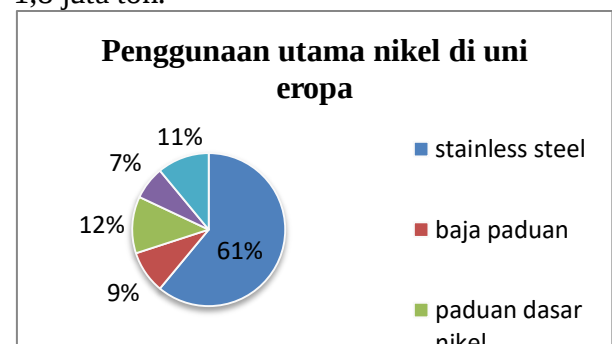
tahan karat atau *stainless steel*, uang koin, besi magnet dan lain-lain.²⁰

Selain negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, bijih nikel yang dimiliki Indonesia berjenis nikel laterit yang memiliki kualitas rata rata tertinggi di dunia.²¹ Kualitas ini menjadikan bijih nikel Indonesia dapat diolah menjadi *stainless steel* berkualitas tinggi.²² Saat ini Indonesia sedang mendorong upaya hilirisasi pada industri mineral. Hilirisasi industri pada sektor pertambangan mineral ini telah tertuang dan di amanatkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009.²³ Salah satu mineral yang saat ini menjalani program hilirisasi adalah nikel. Untuk komoditas nikel, pendapatan nilai tambah dari program hilirisasi diperkirakan akan mencapai sekitar USD 9 Milliar.²⁴

Aturan mengenai pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia tertuang dalam Permen ESDM No.11 tahun 2019 yang mengatur tentang pembatasan ekspor mineral mentah.²⁵ Dalam permen ini dijelaskan bahwa nikel yang memiliki kadar dibawah 1,7% yang sebelumnya diperbolehkan untuk diekspor, sudah tidak boleh lagi di ekspor terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020. Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia memunculkan protes

dari negara Uni Eropa yang sangat bergantung pada persediaan nikel.

UE merupakan salah satu wilayah yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap persediaan nikel global. UE menggunakan sekitar 700.000 ton nikel per tahun. Sebagian besar penggunaannya yaitu untuk bahan baja tahan karat. Produksi baja tahan karat di Uni Eropa lebih dari 177 juta ton, yaitu sekitar 11% dari seluruh total baja tahan karat yang di produksi di dunia.²⁶ Selain China, Uni Eropa termasuk negara penghasil dan pengeksport baja tahan karat terbesar dengan total ekspor nettoanya adalah sebesar 1,8 juta ton.²⁷



Baja merupakan material yang 100% dapat didaur ulang, sehingga sektor ini menjadi bagian fundamental dari ekonomi melingkar di UE. Baja sendiri juga berperan dalam pengembangan dan penyebaran inovatif, serta dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Eropa. Jerman merupakan negara dengan penyumbang produksi baja terbesar di UE yaitu sebesar 25,1%, diikuti oleh Italia yang menyumbang sebanyak 14,8% dan Prancis sebanyak 9,2%. Disepanjang tahun 2019, UE mampu mengeksport sebesar 20,5 juta ton baja ke seluruh dunia.²⁸

²⁰Ibid

²¹Nadya Ahda, "Dibalik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia," *Buletin APBN*, Vol.6 Ed.2 (Februari,2021)hal.9

²²Ibid.

²³Chandra Gian Asmara, "Soal Larangan Ekspor Nikel, Luhut: Demi RI Raup Rp 170T," *CNBC News* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190821145313-4-93647/soal-larangan-ekspor-nikel-luhut-demi-ri-raup-rp-170-t> (diakses pada 25 April 2021)

²⁴Ibid.

²⁵Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara," <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1946/detail> (diakses pada 4 Juni 2021)

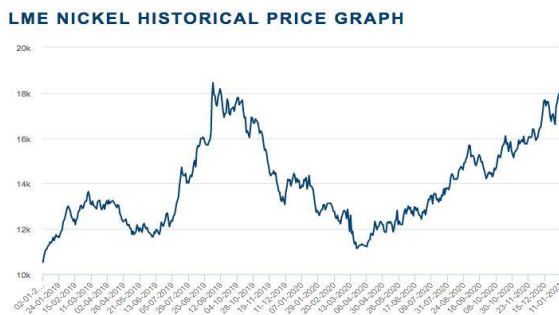
²⁶European Commission, "The EU steel industry," https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel_en (diakses pada 1 Mei 2021)

²⁷Ibid.

²⁸Ibid, hal.14

Dengan produk olahan nikel sebanyak ini, berbagai industri di UE sangat bergantung pada ketersediaan pasokan nikel. Meskipun wilayahnya memiliki pertambangan nikel sendiri, namun dengan kebutuhan industri yang besar ketersediaan nikel di wilayah UE tidak mampu memenuhi kebutuhan industrinya. Diakhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, produksi nikel global mengalami penurunan sebesar 7,4%. Menurut data awal yang dirilis oleh US Geological Survey (USGS), produksi nikel tambang global pada awal tahun 2019 adalah 2.500 kt lalu turun menjadi 2,195 kt pada awal tahun 2020.²⁹

Harga Nikel Tahun 2019-2020³⁰



Sebagian besar produsen baja tahan karat / *stainless steel* global, membeli nikel untuk produksi *stainless steel* mereka dengan berpatok pada harga yang ditentukan oleh *London Metal Exchange* (LME). LME adalah pusat perdagangan industri logam dunia, harga logam yang terdapat pada LME digunakan sebagai referensi untuk perdagangan logam di dunia.³¹ Saat pemerintah Indonesia mengumumkan akan

menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel pada tahun 2019 lalu harga nikel di pasaran melonjak tinggi. Pada tanggal 7 Juni 2019 hingga tanggal 2 September 2019 harga nikel melonjak dari \$11.575 menjadi \$18.620, meningkat sebesar 61% dalam kurun waktu 3 bulan sebelum akhirnya menetap pada harga hampir \$14.000 di akhir tahun 2019.³² Tentu saja kelangkaan dan tingginya harga nikel ini membuat UE kalang kabut untuk memenuhi pasokan nikel bagi industrinya.

Industri besi dan baja memainkan peran penting bagi perekonomian UE. Terdapat lebih dari 500 smelter baja tahan karat yang tersebar pada 23 negara anggota UE.³³ Sebagai komponen yang berperan penting dalam pembuatan baja tahan karat, tentu saja harga nikel dipasaran akan sangat mempengaruhi harga jual baja tahan karat di dunia.

Saat ini, Industri *stainless steel* di UE tengah berada pada level terendahnya dan mengalami defisit pada neraca perdagangannya sekitar -600 ton,³⁴ distorsi perdagangan internasional, dan pandemi yang telah mengganggu rantai pasokan dan berdampak pada sektor hilir.³⁵ Pandemi covid juga secara dramatis membuat permintaan akan baja UE menurun drastis sebesar 15,8%,³⁶ selain itu impor baja yang melebihi

³²LME Nickel Historical Price Graph, London Metal Exchange, <https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Nickel#tabIndex=0>. (diakses tanggal 4 Juni 2021)

³³Eurofer, *European Steel In Figures 2020*. (Brussels, 2020)

³⁴European Commissions, "EU files WTO panel request against illegal export restrictions by Indonesia on raw materials for stainless steel," https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_105 (6 Juni 2021)

³⁵European Commissions, *Towards Competitive and Clean European Steel*, (Brussels, 2021), hal.2.

³⁶Ibid.

²⁹Scott Birch, "Global nickel production to decline by 7.4 percent in 2020," *Mining Global* <https://miningglobal.com/supply-chain-and-operations/global-nickel-production-decline-74-percent-2020> (diakses pada 6 Juni 2021)

³⁰London Metal Exchange, <https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Nickel#tabIndex=0> (diakses pada 6 Juni 2021)

³¹London Metal Exchange <https://www.lme.com/> (diakses pada 1 Juni 2021)

kapasitas dari China, Indonesia dan India telah memenuhi pasar baja UE.³⁷

GUGATAN UNI EROPA KE WTO TERKAIT KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA

UE mengajukan permintaan konsultasi dengan Indonesia pada tanggal 27 November 2019 sesuai tahapan sengketa yang telah ditetapkan WTO. Pokok-pokok yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa dalam pengajuan permintaan konsultasi ini adalah berkaitan dengan larangan ekspor bijih nikel dan persyaratan pengolahan dalam negeri atas mineral terutama bijih nikel.³⁸

Larangan ekspor bijih nikel ini dianggap hal yang tidak sesuai dengan Pasal XI ayat 1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa tidak ada larangan atau pembatasan yang akan diberlakukan atau dipertahankan pada ekspor atau penjualan untuk produk ekspor apapun. Terdapat beberapa point dalam aturan GATT yang dianggap UE telah dilanggar oleh Indonesia, yaitu :

1. Pasal XI.1 GATT tentang larangan pembatasan ekspor dan impor,
2. Pasal 3.1 (b) *Agreement on Subsidy and Countervailing Measures* tentang subsidi yang dilarang
3. Pasal X.1 GATT tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan³⁹

Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia sesuai dengan Pasal 1 dan 4 dari *Understanding on Rules and Procedure the Settlement of Disputes* (DSU), Pasal XXII: 1 dari *General Agreement on Tariffs and Trade*

³⁷Ibid, hal.6.

³⁸World Trade Organization, "European Union initiates WTO dispute case against Indonesian restrictions on raw materials," https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds592r_fc_26nov19_e.htm (diakses pada 30 Juni 2021)

³⁹Ibid.

1994 (GATT 1994), dan Pasal 4.1 dari *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) berkenaan dengan berbagai tindakan mengenai bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat, serta skema pembebasan bea masuk lintas sektoral yang bergantung pada penggunaan domestik atas barang impor.

Konsultasi antara Indonesia dan Uni Eropa berlangsung pada 30 Januari 2020 di Jenewa, Swiss.⁴⁰ Konsultasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan sehingga masalah antara kedua belah pihak mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun konsultasi yang dilaksanakan kedua pihak gagal mencapai kesepakatan.⁴¹ Tindakan Indonesia membatalkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh Uni Eropa, secara langsung atau tidak langsung, berdasarkan perjanjian yang tercakup. Oleh karena itu, Uni Eropa meminta agar sebuah panel dibentuk sesuai dengan Pasal 4.7 dan 6 DSU dan Pasal XXIII GATT 1994, untuk memeriksa masalah tersebut berdasarkan kerangka acuan standar, sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 DSU, Uni Eropa meminta agar permintaan pembentukan panel ini dimasukkan dalam agenda pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa yang akan diadakan pada 25 Januari 2021.⁴² Didalam Konsultasi ini terdapat 5 pokok yang menjadi persoalan bagi Uni Eropa, yaitu :

1. Larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel

Sebagai bagian dari pelaksanaan rencana nasional untuk mengembangkan sektor

⁴⁰Muhammad Choirul Anwar, "Uni Eropa Gugat Pembatasan Ekspor Nikel, Begini Penjelasan RI," *CNBC Indonesia* <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200108101304-17-128461/uni-eropa-gugat-pembatasan-ekspor-nikel-begini-penjelasan-ri> (diakses pada 13 April 2021)

⁴¹Ferry Sandi, "Makin Panas, RI Vs Uni Eropa Perang Gugatan Soal Ekspor Nikel," *CNBC Indonesia* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210225194325-4-226247/makin-panas-ri-vs-uni-eropa-perang-gugatan-soal-ekspor-nikel> (diakses pada 13 April 2021)

industri hilir tertentu termasuk produksi baja nirkarat, Indonesia memberlakukan sejumlah pembatasan ekspor dari bahan baku. Secara khusus, ekspor bijih nikel dilarang di Indonesia pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Indonesia melonggarkan sebagian larangan ekspor dengan mengizinkan sementara ekspor mineral tertentu, termasuk bijih nikel dengan konsentrasi di bawah 1,7%. Namun, pada Agustus 2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa keabsahan dokumen tertentu yang diperlukan untuk ekspor to bijih nikel konsentrasi rendah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga secara efektif larangan ekspor bijih nikel berlaku per 1 Januari 2020.

2. Persyaratan dan pemurnian serta pengolahan nikel di dalam negeri

Ekspor produk pertambangan tertentu mendapat peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tertentu di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Kewajiban ini ditujukan kepada pemegang izin produksi dan berlaku antara lain untuk bijih nikel. Akibatnya, mineral yang belum menjalani operasi pengolahan dan/atau pemurnian tersebut, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, tidak dapat diekspor. Kewajiban ini tidak berlaku dalam hal kepentingan dalam negeri atau penelitian dan pengembangan.

3. Persyaratan pemenuhan kebutuhan didalam negeri

Ekspor produk yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri untuk mineral dan batubara telah terpenuhi. Kewajiban ini berlaku untuk sejumlah mineral termasuk nikel.

4. Persyaratan perizinan ekspor

Lisensi dari otoritas Indonesia diperlukan untuk mengekspor bahan mentah tertentu untuk produksi baja tahan karat, terutama bijih nikel. Bijih nikel dengan konsentrasi lebih rendah dari 1,7% hanya dapat diekspor

dengan ketentuan pemegang izin produksinya telah menggunakan nikel dengan tingkat konsentrasi tersebut paling sedikit 30% dari totalnya kapasitas input di fasilitas pemurnian dan bahwa ia telah membangun atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik mandiri atau bekerjasama dengan orang lain. Ekspor bijih nikel harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Indonesia Kementerian Perdagangan. Permohonan persetujuan ekspor harus memuat sejumlah informasi dan dokumen termasuk rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Kementerian ESDM. Rekomendasi tersebut tergantung pada pemegang izin fasilitas pemurnian bangunan di Indonesia.

5. Skema pemberian subsidi yang dilarang

Indonesia mewajibkan bagi pelaku industri pertambangan untuk membangun smelter atau pabrik untuk pengolahan dan pemurnian nikel. Nikel harus diolah terlebih dahulu didalam negeri dan cadangan nikel yang ada harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara dalam pembangunan smelter dan pembaruan pabrik pengolahan, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk untuk impor bahan baku, alat dan mesin yang dibutuhkan. UE menilai ini tidak adil dan sudah termasuk ke dalam subsidi yang dilarang karena pemerintah Indonesia memberikan subsidi secara spesifik kepada industri pertambangan.⁴³

Ketentuan GATT / WTO yang menjadi fokus terkait dengan pembatasan ekspor nikel adalah ketentuan Pasal XI ayat 1 GATT yang menyatakan larangan untuk membatasi kegiatan ekspor suatu produk kecuali berupa tarif. Larangan ekspor nikel Indonesia diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009. Pada pasal XX (b) dan (g) GATT menyatakan bahwa setiap tindakan yang

⁴³World Trade Organization Document DS592, Op.Cit.

diambil suatu negara secara inkonsisten mengikuti ketentuan GATT/WTO tunduk kepada peraturan dan persyaratan yang ada, dan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut tidak boleh ditetapkan secara diskriminasi diantara negara-negara pada saat berlakunya kondisi yang sama atau adanya pembatasan yang terselubung di dalam perdagangan internasional. Pasal ini bermaksud untuk menghindari penyimpangan penerapan kebijakan. Pasal XX dibuat untuk memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing negara anggota

Pada bulan Januari 2021 lalu, proses konsultasi antara Indonesia dengan pihak Uni Eropa telah dilaksanakan di sekretaris WTO di Jenewa. Pada pertemuan itu pemerintah Indonesia telah memberikan penjelasan tentang pokok-pokok yang menjadi permasalahan bagi Uni Eropa. Indonesia juga telah menolak permintaan Uni Eropa agar Indonesia mencabut kembali kebijakan mengenai larangan ekspor bijih nikel karena Indonesia yakin bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan WTO dan amanat Konstitusi.

Selanjutnya diadakan pertemuan reguler antara DSB dengan WTO pada tanggal 22 Februari 2021 lalu, dimana Uni Eropa secara resmi untuk kedua kalinya kembali meminta pembentukan panel atas sengketa DS592 ini. Namun pada panel kali ini gugatan Uni Eropa berkurang dari yang semula terdapat 5 pokok menjadi 2 pokok saja yaitu pelarangan ekspor nikel dan persyaratan pengolahan nikel di dalam negeri. Pada tanggal 8 Maret 2021, Indonesia mengajukan kriteria panel dalam agenda *preference meeting* dan tinggal menunggu penetapan anggota panel oleh sekretariat DSB WTO.⁴⁴

⁴⁴Rio Indrawan, "Larangan Ekspor Nikel Digugat, Pemerintah Siap Hadapi Uni Eropa," *Dunia Energi* <https://www.dunia-energi.com/larangan->

KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum, penulis mengambil kesimpulan bahwa Uni Eropa secara resmi melayangkan gugatannya terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun 2019 lalu ke *World Trade Organization* (WTO). Gugatan ini diawali dengan konsultasi yang telah dilaksanakan pada 30 Januari 2020 di Jenewa, Swiss namun belum mencapai kesepakatan, untuk itu gugatan dilanjutkan dengan panel pertama pada tanggal 25 Januari 2021. Pada tanggal 22 Februari 2021, dibentuk panel untuk kedua kalinya dan hingga saat ini Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu keputusan terkait panel kedua dari sekretariat DSB WTO. Kebijakan yang dibuat Indonesia membuat Uni Eropa kesulitan terhadap akses bahan baku untuk industri *stainless steel*nya yang membuat pasokan nikel menjadi langka dan harga nikel melonjak drastis. Kebijakan Indonesia juga membuat industri baja Uni Eropa berada dalam posisi yang beresiko dan sulit berkompetitif karena Uni Eropa harus dihadapkan dengan langkanya pasokan dan mahalanya harga nikel yang membuat biaya produksi baja UE meningkat sehingga harga jual baja UE juga meningkat. Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia dengan total produkai 880.000 MT/tahun, dan merupakan nikel laterit yang memiliki kualitas tinggi, yang mampu menghasilkan baja tahan karat berkualitas. Saat ini nikel merupakan salah satu mineral yang banyak diminati karena memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari.

[ekspor-nikel-digugat-pemerintah-siap-hadapi-uni-eropa/](#) (diakses pada 6 Juni 2021)

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ahda, Nadya. "Dibalik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia." *Buletin APBN*, 2021: 8-11.
- Bambang, Yunianto. "Analisis Dampak Kebijakan Nilai Tambah Mineral Indonesia Terhadap Ekspor Dan Ketenagakerjaan." *Jurnal teknologi mineral dan batubara* Vol.10 No.3, 2014: 121-141.
- Izzaty, dan Suhartono. "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel." *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 2019: 19-24.
- Ika, Syahrir. "Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara." *Kajian Ekonomi Keuangan*, 2017: 42-67.
- Isjudarto, A. "Pengaruh Morfologi lokal Terhadap Pembentukan Nikel Laterit." *Seminar Nasional ke-8*, 2013: 10-14.
- Korah, Revy S M. "Prinsip-prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Unsrat*, 2016: 46.
- Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional." *Jurnal Transnasional*, 2013: 896-914
- Prasetyo, Puguh. "Sumber Daya Mineral Di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit Dan Masalah Pengolahannya Sehubungan Dengan UU Minerba 2009." *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, 2016: 1-10.

BUKU

- Eurofer. *European Steel in Figures 2020*. Brusses: Eurofer, 2020.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: kencana, 2015.
- European Commissions. *Towards Competitive and Clean European Steel*. Brusses: European Commissions, 2021.
- Kerjasama Kementerian Keuangan dan Universitas Indonesia. *Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia-Uni Eropa di Bidang Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2012.
- LIPI. *Penguasaan Teknologi Material dan Metalurgi Untuk Menuju Kemandirian Industri Nasional*. Tangerang: Pusat Penelitian Metalurgi dan Material Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1990.
- M, Shaleh Lalu, dan Wahyu Atjo. *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Nickel Institute. *Nickel In European Union*. Sabam: Nickel Institute, 2012.
- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhardi, Gunarto. *Perdagangan Internasional Untuk Kemakmuran Bersama*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

World Trade Organization. *World Trade Organization's Documents WT DS592*.

Z, Achmad, dan DKK. *Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan di Kutai Barat*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM. *Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, 2017.

Rahmadwiputra, Muh. Dindra. *Skripsi : Kajian Estimasi Selektif Sumber Daya Nikel Dengan Metode IDS dan Ordinary Kriging di PT Antam Tbk Unit Geomin Pomala Kolaka Sulawe Tenggara*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2018.

WEBSITE

Administrator. "Posisi Indonesia Sulit Tersaingi." *Indonesia.go.id*. 15 Oktober 2020.
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/posisi-indonesia-sulit-tersaingi> (diakses April 5, 2021).

Alabama, Morteza Syariati. "Daerah Penghasil Nikel Terbesar Di Indonesia." *Tagar.id*. 1 Januari 2020.
<https://www.tagar.id/daerah-penghasil-nikel-terbesar-di-indonesia> (diakses April 23, 2021).

Anwar, Muhammad Choirul. "Uni Eropa Gugat Pembatasan Ekspor Nikel, Begini Penjelasan RI." *CNBC Indonesia*. 8 Januari 2020.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200108101304-17-128461/uni-eropa-gugat-pembatasan-ekspor-nikel-begini-penjelasan-ri> (diakses April 13, 2021).

Asmara, Chandra Gian. "Soal Larangan Ekspor Nikel Luhut: Demi RI Raup

Rp170T." *CNBC News*. 21 Agustus 2019.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190821145313-4-93647/soal-larangan-ekspor-nikel-luhut-demi-ri-raup-rp-170-t2> (diakses April 25, 2021).

BBC News. *Mengapa pemerintah Indonesia mendaftarkan 1.700 'pulau baru' ke PBB?* 6 Juni 2017.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40155730> (diakses Maret 27, 2021).

Blenkinsop, Philip. *Indonesia to WTO over nickel ore export curbs*. 22 November 2019.
<https://www.reuters.com/article/us-eu-indonesia-trade-idUSKBN1XW1D8> (diakses Desember 16, 2020).

Blenkisop, Philip. "Eu Takes Indonesia to WTO Over Nickel Ore Export Curbs." *Reuters*. 22 november 2019.
<https://www.reuters.com/article/us-eu-indonesia-trade-idUKKBN1XW1D8> (diakses Juni 30, 2021).

Center For Strategic and International Studies. *Opportunities for Post-Pandemic Economic Reform and Recovery in the Indonesia-EU CEPA Negotiations*. 6 Mei 2021.
<https://csis.or.id/events/opportunities-for-post-pandemic-economic-reform-and-recovery-in-the-indonesia-eu-cepa-negotiations> (diakses Mei 23, 2021).

CNBC Indonesia. "Ekspor Nikel Dilarang, Untung atau Buntung?" *Youtube*. 3 September 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=gP2jMo2wB4c> (diakses Desember 9, 2020).

CNBC Indonesia. "Uni Eropa Akan Konsultasikan Larangan Ekspor Bijih Nikel RI Lewat WTO." *Youtube*. 11 Desember 2019.
<https://www.youtube.com/watch?v=5dYILbo5GEg> (diakses Juni 30, 2021).

- CNN Indonesia. *Melihat Kronologi Larangan Ekspor Nikel dan Keuntungannya*. 26 Agustus 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826100554-85-424663/melihat-kronologi-larangan-ekspor-nikel-dan-keuntungannya> (diakses April 28, 2021).
- Deil, Siska Amelie F. "Gebrakan RI Stop Ekspor Bijih Mineral Jadi Sorotan Dunia." *Liputan6*. 13 Januari 2014. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/799158/gebrakan-ri-stop-ekspor-bijih-mineral-jadi-sorotan-dunia> (diakses April 26, 2021).
- Embassy of The Republic of Indonesia in Brussels. "European Union ." *Kementerian Luar Negeri*. <https://kemlu.go.id/brussels/en/read/european-union/1669/etc-menu> (diakses Maret 28, 2021).
- Eurofer. *EUROFER supports EU WTO action on Indonesia*. 22 november 2019. <https://www.eurofer.eu/press-releases/eurofer-supports-eu-wto-action-on-indonesia/> (diakses juni 4, 2021).
- European Commisions. *Industri Ekstratif Mineral dan Non-Logam*. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/minerals/metallc_sv (diakses Maret 28, 2021).
- European Commissions. *EU files WTO panel request against illegal export restrictions by Indonesia on raw materials for stainless steel*. 14 Januari 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_105 (diakses juni 6, 2021).
- European Commissions. *Non-metalic Products and Industries*. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/non-metals_en (diakses maret 28, 2021).
- European Commissions. *Policy and Strategy For Raw Materials*. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_en (diakses maret 28, 2021).
- European Commissions. *The EU Steel Industry*. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel_en (diakses Desember 16, 2020).
- European Copper Institute, . *Europe's Copper Industry*. <https://copperalliance.eu/about-us/europes-copper-industry/> (diakses Maret 27, 2021).
- European Union. *Critical raw Materials*. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en (diakses Maret 28, 2021).
- JDIH BPK RI Database Peraturan. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142232/permen-esdm-no-11-tahun-2019> (diakses April 28, 2021).
- Keating, Dave. "Raw Materials in The EU Economy." *Euractive*. 2020. <https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/special-report/EA-SPECIAL-REPORT-STEEL-OF-EU-05022020-EN-V02.pdf> (diakses Juni 30, 2021).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*. 2 September 2019. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020> (diakses April 13, 2021).

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Nilai Strategis Energi Dalam Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa*. 16 Juli 2018. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/nilai-strategis-energi-dalam-kerjasama-ekonomi-komprehensif-indonesia-uni-eropa> (diakses April 23, 2021).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1946/detail> (diakses Juni 4, 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Mesin/Barang/Bahan Untuk Pengembangan Industri Penanaman Modal*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bebaskan-bea-masuk-mesinbarangbahan-untuk-pengembangan-industri-penanaman-modal/> (diakses Juli 8, 2021).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Hubungan RI-Uni Eropa di Bidang Politik dan Keamanan*. 8 april 2019. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/149/view/uni-erop> (diakses maret 28, 2021).
- Kementerian Perindustrian RI. *Hilirisasi Industri Tambang Pantang Mundur*. 9 September 2013. <https://kemenperin.go.id/artikel/7311/Hilirisasi-Industri-Tambang-Pantang-Mundur> (diakses April 25, 2021).
- Liputan6. *Jadi Penghasil Nikel Terbesar Dunia, 10 Negara Ini akan Cuan di Era Mobil Listrik*. 26 Oktober 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4392527/jadi-penghasil-nikel-terbesar-dunia-10-negara-ini-akan-cuan-di-era-mobil-listrik> (diakses April 5, 2021).
- London Metal Exchange. *LME Nickel*. <https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Nickel#tabIndex=0> (diakses Juni 6, 2021).
- Manurung, Hotden, dan Amanda Ayudia s. “Sumber Daya Geologi Indonesia.” *Artikel Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik*. <https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/sumberdaya-geologi-indonesia/> (diakses Maret 27, 2021).
- Mulyana, Ridwan Nanda. “Begini Realisasi Produksi dan Penjualan Bijih Nikel dan Produk Turunannya di Semester I.” *Kontan.co.id*. 25 Juli 2020. <https://industri.kontan.co.id/news/begini-realisasi-produksi-penjualan-bijih-nikel-dan-produk-turunannya-di-semester-i> (diakses April 13, 2021).
- Nickel Institute. *The Nickel Advantage*. <https://nickelinstitute.org/about-nickel/stainless-steel/the-nickel-advantage/> (diakses April 23, 2021).
- Paramita, Rahadian P, Islahuddin, dan Aghnia Azkia. “Nikel Dalam Keseharian.” *Lokadata*. 29 Januari 2018. <https://lokadata.id/artikel/nikel-dalam-keseharian> (diakses April 24, 2021).
- Pellegrini, Mattia. *Fostering the minig potential of the European Union*. <https://eurogeologists.eu/european-geologist-journal-42-fostering-mining-potential-european-union/> (diakses Maret 28, 2021).

- Pratama, Cahya Dicky. "Subsidi Sebagai Bentuk Hambatan Perdagangan Internasional." *Kompas.com*. 12 November 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/140000169/subsidi-sebagai-bentuk-hambatan-perdagangan-internasional?page=all#page2> (diakses Juni 4, 2021).
- Pribadi, Agung. "Bertemu Media, Dirjen Minerba Jelaskan Potensi Sumber Daya dan Cadangan Minerba." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bertemu-media-dirjen-minerba-jelaskan-potensi-sumber-daya-dan-cadangan-minerba%20> (diakses Maret 27, 2021).
- Pribadi, Agung. "Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi." *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*. 14 oktober 2020. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi> (diakses April 5, 2021).
- Redaksi WE Online. "Nilai Tambah Hilirisasi Mineral 268 Miliar Dolar." *Warta Ekonomi.co.id*. 7 April 2014. <https://www.wartaekonomi.co.id/read27248/nilai-tambah-hilirisasi-mineral-268-miliar-dolar> (diakses April 25, 2021).
- Sandi, Ferry. "Makin Panas, RI Vs Uni Eropa Perang Gugatan Soal Ekspor Nikel." *CNBC Indonesia*. 25 February 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210225194325-4-226247/makin-panas-ri-vs-uni-eropa-perang-gugatan-soal-ekspor-nikel> (diakses April 13, 2021).
- Shcier, Thorsten. *Stainless steel prices soar on nickel gains*. 12 september 2019. <https://www.amm.com/Article/3893817/Stainless-steel-prices-soar-on-nickel-gains.html> (diakses Juni 4, 2021).
- Siaran Pers Kementerian Perdagangan Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/id> (diakses Mei 28, 2021).
- Swiss Gold Safe. *Gold and Switzerland*. <https://swissgoldsafe.ch/en/gold-switzerland> (diakses Maret 27, 2021).
- UN Comtrade. <https://comtrade.un.org/>.
- Vitradi, Titra. "RI Setop Ekspor Nikel Lebih Cepat, Harga Bakal Melonjak!" *CNBC Indonesia*. 29 Oktober 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191029103919-17-110876/ri-setop-ekspor-nikel-lebih-cepat-harga-bakal-melonjak> (diakses Desember 16, 2020).
- World Trade Organization. *Agreement On Subsidies and Countervailing Measures*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm_03_e.htm (diakses Juni 4, 2021).
- World Trade Organization. *European Union initiates WTO dispute case against Indonesian restrictions on raw materials*. 27 November 2019. https://www.wto.org/english/news_e/new_s19_e/ds592rfc_26nov19_e.htm (diakses Juni 30, 2021).
- World Trade Organization. *Legal issues arising in WTO dispute settlement proceedings*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_settlement_e/c10s6p1_e.htm